EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN SBY-JK
(Dari sudut pandang ekonomi dan kesejahteraan)

Oleh : Drs. Ngatno, MM

Abstract :
SBY-JK Governance has been worked out for 2.5 years to present. Evaluation result from the economic point of view reveals that the wealth is not satisfying. The Government performance has been good in macros level, being proved with 5.6% economic growth, and inflation rate is less than 10%. But, at the micros level, this one is unsatisfying, that poverty rate is high, 39.5 millions, and the unemployment is 10.22 millions.

Key words : Participation, leadership, women village kader, Posyandu

A. Pendahuluan

Pemerintahan SBY-JK sudah berjalan kurang lebih dua setengah tahun, oleh karena itu perlu kita evaluasi apakah berhasil atau belum berhasil. Untuk mengevaluasi kinerja tersebut kita tidak bisa lepas dari apa yang sudah dijanjikan oleh mereka berdua sebelum mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2004 – 2009.

Janji-janji presiden dan wakil presiden pada saat kampanye Pilpres tersebut mungkin kita semua sudah lupa apa yang dijanjikan pada saat itu, namun yang tidak bisa dilupakan bagi kita adalah janji mereka untuk memperbaiki perekonomian dan janji untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Ada baiknya kami sampaikan inti dari janji presiden pada saat itu apa saja untuk mengingatkan kembali pada kita yaitu : Secara singkat, pokok program kerja SBY-JK dalam lima tahun adalah mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. (Rudy S Pontoh, 2005)

Masih ada ratusan janji dan komitmen (jankomit) lain yang menunggu bukti hingga lima tahun ke depan. Apakah Anda mencatatnya? Mungkin "ya", mungkin juga "lupa-lupa ingat", tapi bisa dipastikan sebagian besar akan menjawab "tidak". Padahal, simaklah apa kata Jusuf Kalla saat berbicara di depan peserta Rakernas Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Balai Diklat Srondol Semarang (17 Juni 2004), "Saya setuju jika janji-janji calon presiden dan calon wakil presiden dicatat, agar jika terpilih nanti, masyarakat bisa menagihnya". (Rudy S Pontoh, 2005)

Janji-janji tersebut adalah : Pemberantasan KKN, Keperdulian Terhadap Rakyat, Perbaikan Pendidikan, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi, Kebijakan dan Pembangunan Daerah, Penegakkan Hukum, Seputar Kepemimpinan, Masalah Ketenagakerjaan, Keamanan dan Pertahanan, Pelayanan Kesehatan, Budaya dan Seni, Kesejahteraan Rakyat, Hubungan dan Kerjasama Internasional, Nelayan dan Petani, Otonomi Daerah, Kebebasan Pers, Pornografi dan Narkoba, Bisnis dan Usaha, Indonesia Masa Depan, Hutan, Laut, dan Lingkungan, Ajakan dan Kebersamaan, Seputar Kabinet, dan Agenda Kerja.

Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah janji-janji tersebut sudah dipenuhi (*Apakah itu sudah diwujudkan*?) oleh SBY-JK sampai saat ini, marilah kita evaluasi khususnya yang menyangkut bidang eknomi dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi terhadap kinerja pemerintahan SBY-JK dapat dilakukan dari sejak awal sampai dengan sekarang, oleh karena itu dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan SBY-JK dapat dilakukan pada waktu berumur 100 hari, 1 tahun, 2 tahun dan pada saat sekarang.

**) Staff Pengajar Jurusan Administrasi Bisnis FISIP UNDIP*

B. Popularitas SBY-JK tidak stabil.

Popularitas pemerintahan SBY-JK mengalami pasang surut sesuai dengan hasil kinerja mereka. Pada awal pemerintahannya mendapat tingkat popularitas yang tinggi yaitu mencapai 80%, namun setelah berjalan kurang lebih 1 tahun menurun drastis hingga 55% dan naik lagi menjadi kurang lebih 67% dan kemudian pada akhir-akhir ini mengalami kemerosotan hingga dibawah 50% (hasil survey Lembaga Survey Indonesia bulan maret 2007). Secara singkat perkembangan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan SBY-JK adalah seperti pada grafik berikut ini.

Grafik Perkembangan Popularitas SBY-JK

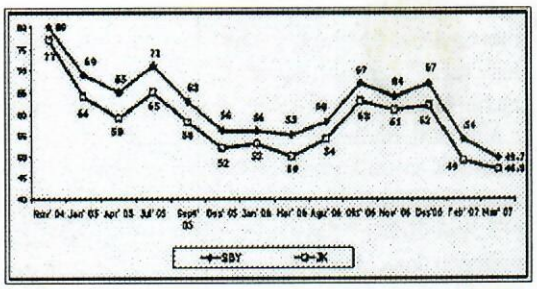

Sumber : hasil riset LSI (Lembaga Survey Indonesia) bulan Maret 2007

Berdasarkan grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa : ketika mengawali jabatan Presiden dan Wapres, popularitas SBY masih 80%, sementara JK 77%. Angka ini sesungguhnya menunjukkan bahwa saat itu mayoritas rakyat menaruh harapan begitu besar terhadap SBY dan JK. Angka kepuasan tersebut melorot hingga pada akhir tahun 2005 dan awal tahun 2006. kemudian pada akhir tahun 2006 tingkat kepuasan ini naik secara signifikan dibanding awal tahun 2006 di mana tingkat kepuasan terhadap SBY sekitar 55%. Dibanding sepetember 2005 yang lalu, kenaikan tidak terlalu berarti, hanya terjadi sekitar 4%.

Dalam survei terakhir, kepuasan publik pada kinerja Presiden dan Wakil Presiden menembus batas psikologis 50%, di mana kurang dari 50% dari pemilih nasional yang merasa puas dengan kerja Presiden. Ini tingkat kepuasan publik terendah terhadap kerja Presiden SBY sejak dua setengah tahun lalu ia dilantik menjadi presiden. Jika dibanding sekitar dua setengah tahun lalu (November 2004), kepuasan terhadap SBY menurun sekitar 30%, dan dibanding Desember 2006, kepuasan publik pada SBY menurun sekitar 17%.

Jika kita tarik benang merah, pada saat angka kepuasan atau popularitas menurun terjadi tuntutan masyarakat agar presiden dan wakil presiden mengantikan menteri-menterinya (reshufel cabinet) baik itu yang terjadi pada akhir tahun 2005 maupun pada awal tahun 2007. Dan pada akhirnya presiden melakukan reshufel kabinet yang pertama yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 2005 dan reshufel kedua dilakukan pada awal bulan Mei 2007.

Jika dikaitkan dengan faktor apa yang menyebabkan naik turunnya popularitas SBY-JK, apakah ada faktor-faktor yang memengaruhi penilaian positif publik terhadap prestasi pemerintahan SBY-JK? Tampaknya,naik turunnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-JK amat dipengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional. Pada saat keadaan ekonomi nasional dipandang kurang baik, popularitas SBY-JK rendah. Sebaliknya pada saat kondisi ekonomi nasional dipandang baik maka popularitas SBY-JK tinggi.Tren inilah yang terjadi pada 2005 dan 2006. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-JK turun yaitu ketika publik menilai kondisi ekonomi nasional kurang memuaskan. seperti terjadi pada Desember 2005-Januari 2006, penilaian publik terhadap kinerja pemerintah juga ikut turun.

Naik turunnya hasil evaluasi (positif-negatif) tentang kondisi ekonomi nasional terkait dengan bagaimana publik menilai kinerja pemerintah dalam mengatasi isu-isu ekonomi spesifik, seperti pengurangan kemiskinan dan pengangguran, ketersediaan dan pengendalian harga kebutuhan pokok, terutama BBM, pengendalian nilai rupiah, investasi,dan pembangunan infrastruktur. (Lembaga Survey Indonesia, 11 Oktober 2006)

Di samping itu, evaluasi atas kinerja pemerintah dalam menanggulangi isu-isu ekonomi terkait erat dengan evaluasi publik atas kinerja para menteri bidang ekonomi, keuangan,dan industri (ekuin). Secara umum,para menteri ekuin dinilai publik hanya berkinerja biasa-biasa saja,walaupun tidak buruk.Dan ini mendorong kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-JK. Faktor politik hukum dan keamanan juga menentukan evaluasi positif publik terhadap kinerja pemerintah.

C. Evaluasi Kinerja SBY-JK pada tahap I (berumur 100 hari)

Pada tahap awal, agar kabinet bisa berjalan efektif dan roda pemerintahan berjalan baik, figur

yang mengisi kabinet haruslah benar-benar berkualitas dan tepat pada bidangnya

BANYAK kalangan berpendapat, 100 hari pertama pemerintahan akan menjadi ajang pembuktian bagi SBY-JK dan kabinetnya menunjukkan kemampuannya dalam memimpin bangsa ini. Masyarakat akan menunggu hasil kinerja pemerintahan SBY-JK dalam rentang waktu tersebut. Jika gagal membuktikan kemampuannya dalam mengimplementasikan langkah-langkah konkret visi dan misinya, sangat mungkin kepercayaan yang telah dibangun oleh rakyat bakal rusak. Terutama menyangkut pemulihan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembuatan lapangan kerja, dan pemberantasan korupsi. (Tajuk Kompas 28 Januari 2005)

Pada saat itu kita memang menyadari bahwa tantangan yang dihadapi pemerintahan SBY-JK dalam lima tahun kedepannya demikian berat. Persoalannya segudang dan sangat kompleks, sehingga sangatlah tidak realistis jika seluruh persoalan itu secara *simsalabim* bisa tuntas diselesaikan oleh SBY-JK dan kabinetnya hanya dalam tempo seratus hari.

Tidak ada komentator yang menilai kinerja 100 hari ini baik. Tetapi, sangat mungkin "hukuman" ini adalah akibat strategi SBY sendiri yang ketika berkampanye telah berjanji terlalu banyak, bahkan disertai ukuran kuantitatip (Sadily, Januari 2005) Sorotan atas 100 hari kinerja pemerintahan SBY-JK mulai terarah kepada para menteri bidang ekonomi. Kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu dievaluasi. Sejumlah menteri mendapat penilaian (rating) terburuk, yakni F (failure atau gagal). Mereka adalah Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, Men BUMN Sugiharto, dan Menkop UKM Suryadharma Ali.

Secara umum kelemahan utama tim ekonomi selama 100 hari pemerintahan terletak pada ketidakmampuan mereka menerjemahkan visi dan misi SBY-JK ke dalam program dan kebijakan konkret. "Ada kesenjangan besar antara visi dan misi presiden dengan program yang dirancang dan dijalankan menteri ekonomi,"

Sebagai bukti kegagalan tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pada saat itu tecermin jelas dari program 100 hari. "Misalnya, perintah presiden agar para menteri melakukan shock therapy tidak dilaksanakan. Justru rakyat sendiri yang jadi shock karena dalam 100 hari tim ekonomi tidak melakukan banyak hal konkret,".

Melalui informasi secara spesifik tersebut, SBY diharapkan akan merespons langsung dalam bentuk tindakan konkret. "Jika memang merasa perlu reshuffle, ya sebaiknya segera dilakukan," Namun dalam kenyataannya belum dilakukan reshufel sampai dengan akhir tahun 2005 baru dilakukan reshufel setelah angka popularitas SBY-JK menurun hingga 55%.

D. Evaluasi Kinerja SBY-JK pada tahap II (berumur 1 tahun)

Dalam banyak hal, perilaku Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak beda dengan kedua pendahulunya, Gus Dur dan Megawati. Ketiganya sering melancong ke luar negeri. Alasannya pun sama, yaitu untuk menarik investor asing. Dengan demikian, bisa terbuka lapangan kerja dan angka pengangguran menurun (Tjipta Lesmana, Gatra, Nomor 51, 2006)

Setelah satu tahun pemerintahan SBY-JK berjalan, terjadi penurunan tingkat kepuasan atas kinerja SBY-JK. Hasil survei menunjukkan penurunan tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tajam. Berdasarkan grafik didepan menunjukkan bahwa penurunan itu mencapai 17 persen dari 80 persen pada survei September 2004 menjadi 63 persen pada survei September 2005. (Hasil survey Lembaga Survei Indonesia September 2005)

Dalam masa waktu 1 tahun, bagi presiden sudah cukup untuk mengevaluasi kinerja para kabinetnya dan cukup tepat momentumnya karena setelah satu tahun berjalan, pemerintah perlu melakukan evaluasi atas kinerjanya di berbagai bidang. Bukan tidak mungkin akan diadakan pergantian, asalkan bukan atas tekanan politik. (Jhon Tafbu Ritonga, WASPADA Online 15 Okt 05)

Reshuffle menjadi suatu kebutuhan manakala itu dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja. Untuk apa mempertahankan yang jelas-jelas kurang mampu, sementara pemerintahan ini masih akan berjalan empat tahun lagi.

Penurunan tingkat kepuasan terutama pada kinerja bidang ekonomi. Kemampuan menteri-menteri ekonomi mulai diragukan. Bisa diperkirakan bagaimana masyarakat lebih kecewa lagi setelah menghadapi kenaikan harga BBM yang dampaknya begitu berat dirasakan. Sebagian justru bisa menilai itu sebagai langkah berani dan tidak populer, namun sangat tepat. Namun sebagian yang lain, mungkin sebagian besar, akan menganggap sebagai sesuatu yang sangat mengecewakan. Kinerja tim ekonomi akan dianggap makin buruk bila mereka tak mampu mengendalikan situasi ekonomi makro dan menjaga berbagai indikator ekonomi seperti laju pertumbuhan, inflasi, nilai tukar rupiah, indeks harga saham, dan suku bunga perbankan.

Sulit dibayangkan perasaan keduanya saat membaca atau mengetahui hasilnya evaluasi kinerja pemerintahan SBY-JK pada saat itu. Mungkin keduanya dengan nafas berat meng-amin-i bahwa memang tidak banyak yang dicapai dalam setahun tersebut. Mungkin pula keduanya bergumam, *"mau mencapai apa...., wong yang ada cuma hutang, bencana dan musibah melulu."*

Kondisi ekonomi selama setahun masa pemerintahannya terus mengalami kemerosotan dan gonjang ganjing yang berpotensi menjurus ke arah perkembangan yang membahayakan bagi kehidupan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Muncul keraguan terhadap kemampuan Tim Ekonomi yang terpilih dinilai lebih mencerminkan kepentingan kelompok bisnis "negatif" dan kepentingan internasional, dan sebaliknya tidak mencerminkan visi misi SBY-JK yang memiliki garis keberpihakan kepada kepentingan nasional. (Indonesia Bangkit, Senin, 17/10/2005)

Berbagai keraguan tersebut terbukti, dimana Tim Ekonomi nyaris tidak mencatat prestasi yang berarti dan gagal menciptakan landasan dan sinyal menuju perubahan seperti yang dijanjikan SBY-JK pada masa kampanye pada saat evaluasi 100 hari.

Namun sebagian kalangan saat itu masih memberikan kesempatan, karena 100 hari dianggap belum cukup untuk menilai kinerja sebenarnya. Hanya sayangnya, meski telah diberi kesempatan, kinerja Tim Ekonomi tak kunjung membaik dan malah semakin menonjolkan kelemahan personal dan profesionalnya.

Berikut beberapa kelemahan bidang ekonomi yang telah berdampak buruk terhadap kinerja ekonomi nasional selama setahun pemerintahan SBY-JK :

1. Tidak melakukan antisipasi ke depan selama setahun pemerintahan, Tim Ekonomi sangat sibuk menebar optimisme, dengan mengklaim telah terjadi perbaikan ekonomi. Padahal data dan fakta ekonomi riil dan moneter menunjukkan tren yang sebaliknya. Pengangguran terbuka meningkat dari 9,9 persen pada Agustus 2004 menjadi 10,3 persen pada Februari 2005. Kemiskinan juga terus meningkat dari sekitar 36 juta orang pada November 2004 menjadi lebih dari 40 juta orang pada Agustus 2005;
2. Nilai tukar rupiah, inflasi suku bunga semakin memburuk; Terjadi triple defisit sekaligus yaitu defisit anggaran, defisit transaksi berjalan dan defisit neraca modal serta kepanikan masyarakat dan kalangan bisnis. Lantaran optimisme Tim Ekonomi yang berlebihan, berbagai resiko ekonomi yang muncul seperti kenaikan harga minyak dunia telah gagal diantisipasi, sehingga cashflow pemerintah mengalami tekanan yang lebih tinggi dari seharusnya serta berdampak pada kelangkaan BBM yang cukup parah dan memicu koreksi yang lebih tajam pada nilai tukar rupiah.
3. Dalam menyelesaikan masalah cenderung mencari "cara mudah" dan "jalan pintas". Hal ini terlihat pada kasus kenaikan beban subsidi akibat tingginya harga minyak dunia, Tim Ekonomi dengan sangat mudahnya menempatkan kenaikan harga BBM sebagai satu-satunya solusi, tanpa inisiatif dan upaya ekstra untuk mencari alternatif penghematan lain. Padahal kenaikan harga BBM jelas memberikan dampak ekonomi dan sosial yang sangat luas bagi masyarakat, yang seharusnya ditempatkan sebagai pilihan terakhir.
4. Lebih disayangkan lagi, ternyata kebijakan menaikkan BBM tersebut tidak diikuti dengan berbagai langkah untuk mengurangi beban

masyarakat seperti upaya meredam dampak kenaikan harga BBM terhadap melonjaknya harga kebutuhan pokok dan menyusun skema pemberian dana kompensasi yang efektif. Gembar gembor dana kompensasi kenaikan BBM 1 Maret dalam prakteknya masih belum sepenuhnya terealisasi (hanya sekitar 50 % per 30 September 2005). Tidak heran jika daya beli masyarakat akhirnya merosot tajam karena inflasi yang tinggi dan "overshooting", yang berakibat pada peningkatan kemiskinan dan lemahnya daya tahan rakyat sehingga rentan terhadap berbagai penyakit.

E. Evaluasi Kinerja SBY-JK pada tahap III (berumur 2 tahun)

Pada hari Jumat, 20 Oktober 2006, usia pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) menginjak dua tahun. Pada usia dua tahun tersebut, rasanya pantas jika melihat kembali program pasangan SBY-JK. Secara singkat, pokok program kerja SBY-JK dalam lima tahun adalah mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis, serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. *Pertanyaan yang muncul kembali di benak kita waktu itu adalah* ***Apakah itu sudah terwujud?***

Tak mudah menjawabnya. Paling tidak, evaluasi publik terhadap kinerja SBY-JK dapat dirangkum dalam dua pandangan yang bertentangan. Pertama, persepsi masyarakat yang menganggap kinerja SBY-JK pada umumnya memuaskan, sebagaimana hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2006.

Sementara persepsi kedua, yang tercermin dalam pemberitaan media massa, menganggap kinerja SBY-JK masih jauh dari harapan. Sebagian menganggap kegagalan SBY-JK disebabkan gaya kepemimpinan SBY yang kurang tegas, terlalu hati-hati, dan sebagainya.

Popularitas SBY-JK, sekitar 67 persen (hasil survei LSI, Oktober 2006), tidak mudah ditransformasi menjadi kekuatan yang dapat mengimbangi aliansi partai di parlemen bila terjadi konflik antara pemerintah dan DPR. Selain itu, pemerintahan SBY-JK juga menghadapi birokrasi dengan profesionalisme yang rendah. Dengan demikian, dalam batas tertentu dapat dikatakan kelangsungan pemerintahan SBY-JK justru diselamatkan oleh kepemimpinan SBY yang dianggap lembek, hati-hati atau sering dikatakan ragu-ragu, serta disiplin partai yang lemah.

Di bidang ekonomi bagaimana hasilnya untuk tingkat makro, seperti masalah inflasi, pemerintah relatif dapat menanganinya dengan baik, inflasi sekarang cenderung turun dan kemampuan daya beli masyarakat sudah mulai naik.

Namun, keberhasilan pemerintah di bidang ekonomi makro tersebut ternyata tidak serta merta mendukung perbaikan dan peningkatan di sektor ekonomi mikro. Mengapa implementasi pertumbuhan ekonomi tidak membuat jumlah pengangguran menurun bahkan malah cenderung naik. (Jentera, 29 Desember 2006)

Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, tetapi tidak mengalami perubahan yang berarti. Pada akhir tahun 2004 di akhir pemerintahan Megawati, tingkat pertumbuhan ekonomi berkisar 5,1 persen, sedangkan pada akhir tahun 2006 ini saat pemerintahan SBY-JK, pertumbuhan ekonomi berkisar 5,4 persen. "Memang tidak banyak perubahan karena pertumbuhan ekonomi cenderung naik. Namun dibandingkan dari segi pengangguran terlihat bahwa pada saat pemerintahan Megawati tingkat pengangguranny lebih rendah, sedangkan pada saat pemerintahan SBY-JK saat ini pengangguranny jauh lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi di sektor mikro memang masih lemah.

Pada saat itu masyarakat yang berpendapatan rendah memiliki problem yang teramat berat, misalnya masalah bagaimana mengatasi kenaikan biaya transportasi akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), bagaimana mengatasi kemiskinan dan bagaimana mengatasi kemungkinan kalau dirinya tidak bekerja atau menganggur. Meskipun ada masalah seperti itu, masyarakat tersebut tetap memiliki kepercayaan tinggi kepada SBY-JK. Sebab yang dilihat oleh rakyat bukan terletak kepada bagaimana apa yang bisa diberikan oleh rakyat dan lebih kepada sosok atau figurnya. Masalah terpenting bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah bukan pada naiknya tingkat biaya hidup atau kenaikan barang, tetapi pada pemerintah dapat menyediakan barang yang diperlukan.

F. Evaluasi Kinerja SBY-JK Tahap IV (Pada saat ini, berumur 2,5 tahun)

Popularitas SBY-JK Menurun, sampai menembus batas psikologis, sedikitnya dua masalah menarik menyertai genap dua setengah tahun usia pemerintahan ini, yakni reshuffle (perombakan)

kabinet dan tingkat popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres Jusuf Kalla (SBY-JK) yang anjlok. Dua masalah ini pula yang menyita perhatian publik belakangan ini.

Anjloknya popularitas SBY-JK diawali adanya ketidakharmonisan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) khususnya dalam pembentukan UKP3R (Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi) yang sampai sekarang tidak ada gaungnya. Hal tersebut merupakan contoh buruk yang mencerminkan bagaimana pemimpin bangsa belum menunjukkan karakter sebagai negarawan sejati. (Suara Merdeka, 29 Desember 2006)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera merespons tuntutan masyarakat dan wakil rakyat yang menginginkan kinerja positif kabinetnya. Hasil survei terbaru Lembaga Survey Indonesia menunjukkan menurunnya popularitas SBY-JK hingga ke angka 49,7 persen dan 46,9 persen, padahal ketika mengawali jabatan Presiden dan Wapres, popularitas SBY masih 80%, sementara JK 77%. Angka ini sesungguhnya menunjukkan bahwa saat itu mayoritas rakyat menaruh harapan begitu besar terhadap SBY dan JK.

Lantas apa penyebab anjloknya popularitas Presiden dan Wapres? Penyebabnya adalah kesulitan hidup mayoritas rakyat Indonesia, menyusul masalah ekonomi yang tak kunjung bisa diatasi, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan inflasi yang tinggi.

Kondisi ekonomi secara keseluruhan belum juga membaik, meski indikator makro selama 2005-April 2007 cukup baik dan stabil. Pertumbuhan ekonomi selama 2005 dan 2006 tidak mencapai target, hanya 5,6% dan 5,8%, akibat kebijakan fiskal dan moneter yang ketat tahun lalu, investasi yang rendah, dan sektor riil yang stagnan terpukul oleh kenaikan harga BBM pada 2005. Bahkan terjadi persepsi berbagai pihak terkait sejauh mana modalitas SBY-JK sejauh ini. Hal menarik dari berbagai evaluasi tersebut adalah, hampir semuanya meyakini SBY-JK masih memiliki modalitas politik amat kuat.

Terdapat dua kutub pendapat menyangkut hal ini: Pertama, ada kalangan yang melihat SBY-JK masih sering ragu-ragu walaupun dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, ada pula yang melihat SBY-JK sudah kelewat percaya diri saat menaikkan harga BBM hingga 120% sekaligus. (Adrianus Meliala, 2006)

Terjadi pula proses deindustrialisasi karena adanya PHK dalam jumlah besar di industri manufaktur, sehingga para pekerjanya kehilangan daya beli. Akibatnya, angka kemiskinan pada Maret 2006, berdasarkan data BPS, melonjak menjadi 39,05 juta jiwa atau 17,75% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 222 juta jiwa. (CBN-Portal, Cybernews, 23 Apr 2007)

Tingkat pengangguran pun masih tinggi, kendati turun menjadi 9,64 juta jiwa (8,93%) tahun lalu. Tingkat pengangguran terbuka bahkan cukup tinggi, sekitar 10,22 juta jiwa atau 9,65%. Lebih memprihatinkan lagi, angka gizi kurang dan gizi buruk, berdasarkan data sebesar 28% dari total anak Indonesia yang berjumlah 58 juta jiwa (Susenas, 2006).

Kondisi ekonomi secara keseluruhan yang belum membaik itu, kalau tidak ingin dikatakan jauh dari harapan, perlu segera diperbaiki. Karena itu, perombakan kabinet harus terutama menyentuh tim ekonomi, yang dikomandani Menko Perekonomian, dengan menampilkan figur-figur terbaik yang ahli dan profesional.

Berbagai sudut kota di Indonesia ada yang sedang mengalami krisis BBM, rawan pupuk, antre beras. Begitu pula kasus lumpur Lapindo belum memperlihatkan titik terang. Akibat dari kasus lumpur Lapindo ini, berbagai kegiatan ekonomi masyarakatnya terhenti. Sudah barang tentu, akan menyebabkan tingginya angka pengangguran dan melemahnya kembali daya beli masyarakat, yang pada gilirannya menambah kuantitas masyarakat miskin. Dengan kata lain, kasus lumpur Lapindo ini memiliki *multiplier effect* terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya.

Disamping itu struktur pasar dalam perekonomian Indonesia cenderung oligopolis, baik di sektor produksi maupun distribusi. Hal ini menyebabkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan ekonomi yang lebih luas menjadi terbatas, dimana kapasitas pasokan barang tidak optimal dan ekspansi pasar domestik secara keseluruhan menjadi lambat. Kondisi ini pada gilirannya mengakibatkan akumulasi kelebihan likuiditas di sektor keuangan menjadi semakin besar, karena dana yang terkumpulkan tidak tersalurkan ke sektor-sektor usaha yang produktif. (Erna Zetta dan Tulus Tambunan, 2007)

Dengan belum membaiknya kondisi ekonomi selama 2,5 tahun tersebut, maka muncullah isu reshufel kabinet. Selama 2,5 tahun masyarakat menilai kinerja SBY-JK lebih banyak gagal. Sebab itu, *reshuffle* harus dijadikan momentum

memperbaiki kinerja. "SBY harus betul-betul mempertimbangkan asas profesionalisme,"

Hanya saja, seperti biasa, selalu ada anak kalimat yang menjadi bahasa sayap Presiden: "Kalau *toh* ada *reshuffle*, itu karena kebutuhannya. Itu hasil evaluasi dan upaya kita untuk meningkatkan sinergi, kinerja, efektivitas, dan *team work* kabinet."

G. Penutup

Dari evaluasi kinerja pemerintahan SBY-JK sampai saat ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada tahap awal pemerintahannya kepercayaan masyarakat sangat tinggi namun, namun setelah berjalan satu tahun mengalami kemerosotan karena adanya keraguan terhadap tim ekonominya, sehingga menuntut pergantian kabinet khususnya bidang ekonomi yang dilakukan pada tanggan 5 Desember 2005.
2. Setelah dilakukan pergantian kabinet terbatas, maka kepercayaan masyarakat dapat meningat hingga pada akhir tahun 2006, akan tetapi kemudian merosot lagi hingga dibawah 50% dan tuntutan untuk reshufel kedua muncul lagi. Pada akhirnya reshufel dilakukan pada bulan Mei 2007.
3. Secara makro kinerja pemerintahan SBY cukup baik yang dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan yang semakin meningkat, tingkat inflasi cukup terkendalikan dan daya beli masyarakat dapat ditingkatkan. Sebaliknya kondisi ekonomi secara keseluruhan yang belum membaik itu, kalau tidak ingin dikatakan jauh dari harapan karena jika dilihat secara mikro belum menunjukkan keberhasilan yang titandai dengan jumlah penduduk misikin masih sangat tinggi, tingkat pengangguran masih meningkat terus dan angka gizi buruk anak masih tinggi.
4. Untuk masa 2,5 tahun kedepan, maka pemerintah harus focus pada sektor riil yang dapat membuka peluang kerja yang besar dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga angka kemisikinan dapat diperkecil.

Daftar Pustaka

1. Adrianus Meliala, ***Mengevaluasi evaluasi 1 tahun pemerintahan SBY-JK***, adrianus@makara.cso.ui.ac.id)
2. Anonimous, Badan Pusat Statistik (BPS), ***Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas),*** Maret 2006
3. Anonimous, Berita Resmi, ***Statistik***, No 47/ IX/1 September 2006
4. Anonimous, Popularitas SBY-JK Menurun, Menembus Batas Psikologis, ***Hasil Surver LSI*** ,15- 25 Maret 2007
5. Anonimous, CBN-Portal, ***Resuffle Kabinet, Solusi Permasalahan Bangsa,*** Cybernews, 23 Apr 2007.
6. Anonimous, (Jentera, 29 Desember 2006)
7. Anonimous, ***Evaluasi Setahun Ekonomi :Kemerosotan Ekonomi Akibat Kelemahan Kapabilitas,*** Indonesia Bangkit, Senin, 17/10/ 2005)
8. Anonimous, ***Disharmoni SBY-JK Akan Makin Memburuk***, (Suara Merdeka 29 Desember 2006
9. Anonimous, ***100 Hari Pemerintahan SBY-JK***, Tajuk Kompas, 28 Januari 2005
10. Erna Zetha dan Tulus Tambunan, DR, ***Perkembangan Ekonomi Indonesia, Analisa Bulanan***, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Januari 2007.
11. Jhon Tafbu Ritonga, ***Evaluasi Kinerja Tim Ekonomi SBY – JK***, WASPADA Online15 Okt 05
12. M. Sadli, Prof. ***Menilai Kinerja 100 hari Pemerintah SBY-JK***, Pacific Ling, 31 Januari 2005
13. Rudi S Pontoh, ***Janji-Janji & Komitmen SBY-JK, Menabur Kata, Menanti Bukti,*** *2005*
14. Tjipta Lesmana, ***Pemerintahan SBY Kian Membingungkan***, *Gatra* Nomor 51, Beredar Kamis, 2 November 2006